



Accountability Paper

MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DALAM ANCAMAN RESESI GLOBAL

Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

**Achmad Yugo Pidhegso
Mochammad Ramadhan**

5 November 2022

Abstrak: World Bank memproyeksikan kemungkinan akan terjadi resesi ekonomi secara global pada tahun 2023 yang dipicu oleh kenaikan suku bunga secara bersamaan yang dilakukan bank sentral di beberapa negara sebagai bentuk usaha dalam merespon lonjakan inflasi akibat dari efek pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina. Kenaikan inflasi terjadi di Uni Eropa, Amerika Serikat, bahkan Indonesia dimana hal ini patut menjadi perhatian bahwa dimungkinkan Indonesia juga akan mengalami perlambatan ekonomi akibat resesi global. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan saran kebijakan dalam rangka melindungi perekonomian Indonesia dan masyarakat dari ancaman resesi global tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada pada jalur yang positif setelah Pandemi Covid-19. Data menunjukkan bahwa Indonesia perekonomian Indonesia bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan profil ekonomi yang bergantung terhadap sektor lokal, Pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada sektor UMKM karena sektor ini berkontribusi besar terhadap PDB. Selain itu, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan pengangguran diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah perlu untuk menunda proyek IKN untuk lebih memfokuskan anggaran pada perlindungan ekonomi, serta perlunya memulai untuk melakukan diversifikasi tujuan ekspor.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Resesi Global

PENDAHULUAN

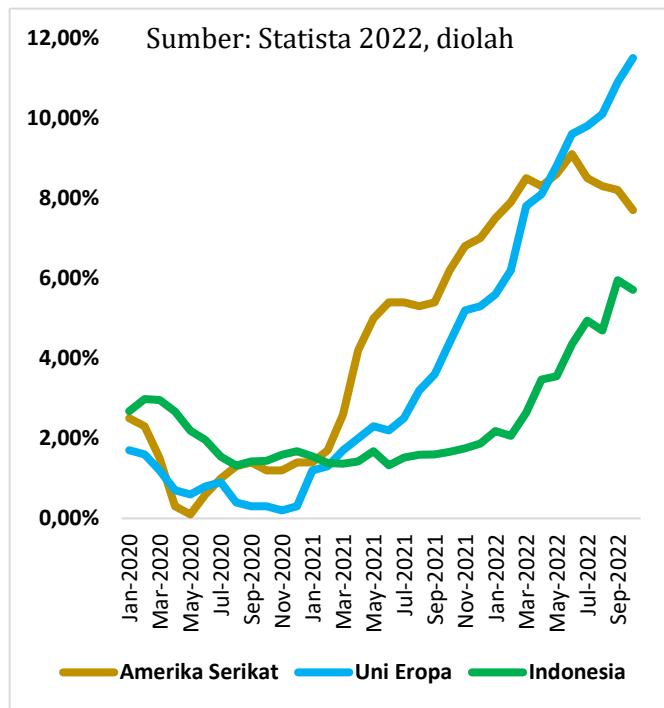
World Bank dalam laporannya memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi secara global pada tahun 2023. Resesi ekonomi global merupakan kondisi dimana terjadi penurunan perekonomian secara global yang salah satunya dapat dilihat dari penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu resesi dapat juga ditandai dengan tingkat pengangguran yang meningkat (Investopedia, 2022). Selama tahun 1970 – 2021, dunia telah mengalami 5 (lima) kali resesi ekonomi global yaitu pada tahun 1975, 1982, 1991, 2009, dan tahun 2020 saat terjadi Pandemi Covid-19. Jika prediksi World Bank benar adanya, maka resesi global tahun 2023 merupakan resesi yang sama dengan dimana resesi sebelumnya yaitu resesi global tahun 2020. Terdapat beberapa indikator-indikator yang menjadi acuan untuk mengetahui suatu negara mengalami resesi ekonomi menurut Aristanti (2022), yaitu:

- 1. Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau menurun selama dua kuartal berturut-turut.**
- 2. Terjadi inflasi atau deflasi yang tinggi.** Inflasi tinggi menyebabkan kebutuhan pokok tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, sedangkan deflasi tinggi akan menyebabkan perusahaan gagal untuk memperoleh laba yang pada akhirnya akan *collapse*.
- 3. Tingkat pengangguran tinggi.** Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang penting dalam produksi dan perekonomian negara. Tingginya pengangguran akan mempersulit daya beli masyarakat.
- 4. Nilai Impor lebih besar dari pada nilai ekspor.** Keadaan tersebut mengandung risiko defisit anggaran yang dapat mengakibatkan turunnya pendapatan nasional. Jika terus menerus terjadi, maka akan menyebabkan resesi ekonomi.
- 5. Adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi.** Keseimbangan ini perlu untuk dijaga agar ekonomi terus berjalan dengan lancar. Surplus produksi tanpa diikuti konsumsi akan membuat stok barang menumpuk, sebaliknya kekurangan produksi mengharuskan negara melakukan impor.

World Bank memiliki beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi pada negara maju dan negara berkembang dalam skenario resesi global tahun 2023, yaitu secara keseluruhan ekonomi global di tahun 2022 diprediksi akan tumbuh sebesar 2,8% dan di tahun 2023 sebesar 0,5%, untuk ditahun 2024 diprediksi akan tumbuh sebesar 2%. Pertumbuhan ekonomi pada negara maju di tahun 2022 diprediksi akan tumbuh sebesar 2,3% dan di tahun 2023 sebesar -0,6%, untuk ditahun 2024 diprediksi akan tumbuh sebesar 1%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang salah satunya Indonesia ditahun 2022 diprediksi akan tumbuh sebesar 3,5% dan di tahun 2023 sebesar 1,8%, untuk ditahun 2024 diprediksi akan tumbuh sebesar 3,4%.

Kemungkinan resesi global pada tahun 2023 dipicu oleh kenaikan suku bunga secara bersamaan yang dilakukan bank sentral di beberapa negara dalam usaha untuk merespon lonjakan inflasi. Pada Oktober tahun 2022, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) telah menaikkan suku bunga menjadi 3% - 3,25%, bahkan kenaikan suku bunga ini diteruskan pada November 2022 yaitu menjadi 3,75% - 4%. Kenaikan suku bunga oleh The Fed ini memang dilakukan untuk menekan efek inflasi Amerika Serikat yang sedang meningkat yaitu pada tahun 2020 inflasi berada pada kisaran 0 – 1,4%, lalu pada tahun 2021 naik menjadi kisaran 1,4% - 7%, dan pada tahun 2022 terus meningkat sampai dengan kisaran 7,5% - 9,1%.

Grafik 1. Inflasi Amerika Serikat dan Uni Eropa



Lonjakan inflasi juga terjadi di Uni Eropa dimana pada tahun 2020 inflasi di Uni Eropa berkisar antara 0,2% - 1,7%, lalu tahun 2021 naik menjadi kisaran 1,2% - 5,3%, dan terus naik hingga pada tahun 2022 berkisar antara 5,6% - 11,5%. *European Central Bank* (ECB) bereaksi dengan menaikkan suku bunga 200 basis poin sampai dengan 2% dalam kurun waktu 4 bulan saja yaitu Juli 2022 sampai Oktober 2022.

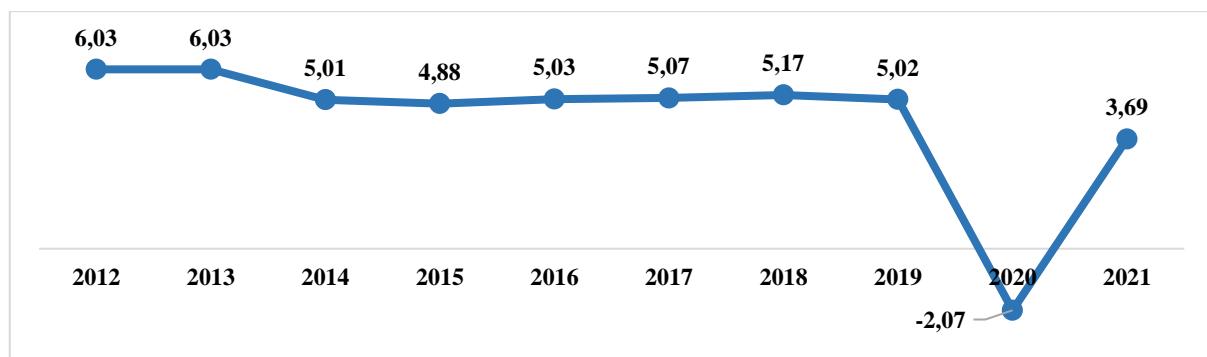
Pola yang sama juga terjadi di Indonesia walaupun tidak separah di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia mengalami kenaikan inflasi yaitu pada tahun 2020 inflasi berada pada kisaran 1,3% - 2,9%, lalu pada tahun 2021 sebesar 1,3% - 1,9%, dan naik pada tahun 2022 menjadi 2% - 5,9%. Dalam usaha untuk menekan inflasi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan di Indonesia atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) naik secara gradual yaitu Oktober 2022 naik menjadi 4,75% lalu November 2022 kembali naik menjadi 5,25%.

Peningkatan inflasi pada beberapa negara ini dipicu oleh beberapa faktor yaitu ekonomi negara yang belum sepenuhnya pulih dari Pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina yang mengacaukan rantai pasokan beberapa komoditas dan juga pasokan energi dunia.

Berangkat dari pola kenaikan inflasi yang terjadi di Indonesia dan juga terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa, Pemerintah patut waspada kemungkinan terjadinya resesi di Indonesia. Namun, berdasarkan prediksi World Bank di atas, dapat disimpulkan bahwa resesi ekonomi global pada tahun 2023 ini akan lebih dirasakan dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara maju dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. Namun Indonesia tetap harus waspada dan mempersiapkan langkah-langkah untuk lebih melindungi perekonomian Indonesia dari kemungkinan terjadinya resesi di tahun 2023.

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

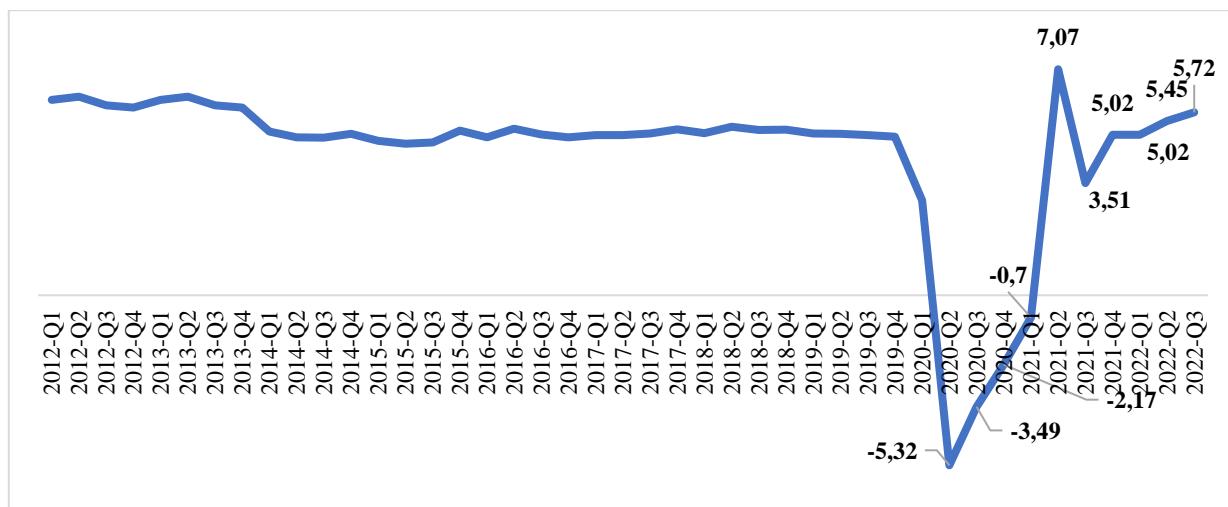
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (YoY)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 3,69% (YoY) setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia sudah membaik dan menuju kepada performa sebelum adanya Pandemi Covid-19 yaitu dari tahun 2012-2019 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28%. Namun ketika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal (QoQ), Indonesia dapat dikatakan telah kembali kepada performa sebelum Pandemi Covid-19, dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (QoQ)

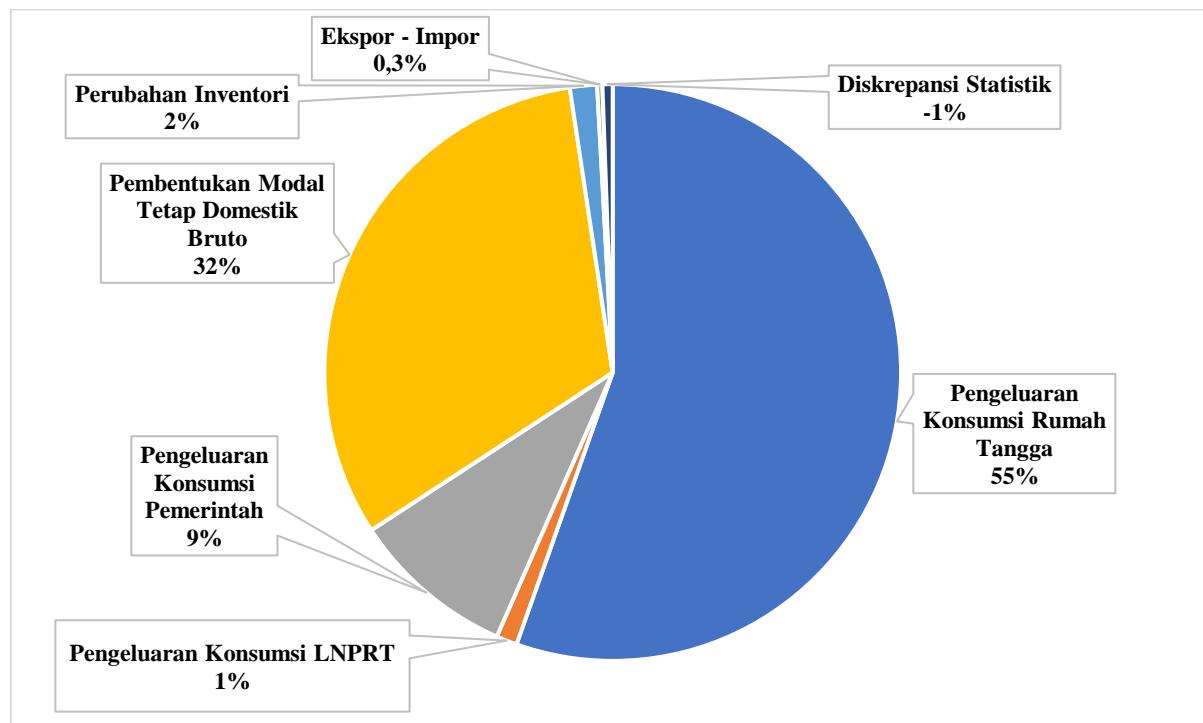


Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Dapat dilihat bahwa Pandemi Covid-19 sempat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun bebas sebesar -5,32% pada Kuartal II tahun 2020. Serangkaian kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) oleh Pemerintah mulai membawa hasil yaitu pertumbuhan ekonomi kembali ke angka positif bahkan saat ini yaitu Kuartal III tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% dimana pada masa sebelum Pandemi Covid-19 yaitu Kuartal I tahun 2012 sampai dengan Kuartal IV tahun 2019, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,28%.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi baik YoY maupun QoQ, Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda menuju resesi. Meski begitu, ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri berpendapat bahwa Indonesia akan mengalami perlambatan ekonomi namun tidak sampai mengalami pertumbuhan ekonomi minus atau masuk ke dalam jurang resesi. Selanjutnya perlu diketahui bahwa perekonomian Indonesia lebih bergantung kepada konsumsi rumah tangga, investasi fisik, dan ekspor. Hal tersebut dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Grafik 4. Produk Domestik Bruto atas Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2012-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, bahkan proporsi konsumsi rumah tangga lebih dari setengah PDB Indonesia yaitu sebesar 55%, diikuti oleh pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 32%, lalu diikuti oleh ekspor yaitu 21,1% namun impor barang dan jasa juga besar yaitu sebesar 20,8%. Besarnya proporsi konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto, dan ekspor barang dan jasa dalam perekonomian Indonesia seharusnya sudah disadari oleh Pemerintah, segala langkah perlindungan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi global seharusnya dimulai dari perlindungan konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor Indonesia yang memiliki daya ungkit sangat besar.

Jika kita melihat lebih detil ke dalam PDB Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu tahun 2012 - 2021, 3 (tiga) jenis pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDB Indonesia adalah investasi fisik jenis bangunan sebesar 24,05%, pengeluaran untuk makanan dan minuman selain restoran yaitu sebesar 22,06%, dan ekspor barang sebesar 18,77%.

Tabel 1. Detil Produk Domestik Bruto atas Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2012-2021

PDB Penggunaan	Rata-Rata 2012 - 2021	PDB Penggunaan	Rata-Rata 2012 - 2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,06	d. Peralatan Lainnya	0,51
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	22,06	e. CBR	1,85
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,05	f. Produk Kekayaan Intelektual	0,81
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	7,33	5. Perubahan Inventori	1,54
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,86	6. Ekspor Barang dan Jasa	21,10
e. Transportasi dan Komunikasi	12,63	a. Barang	18,77
f. Restoran dan Hotel	5,46	a.1. Barang Non-migas	16,70
g. Lainnya	2,68	a.2. Barang migas	2,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,18	b. Jasa	2,33
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,31	7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	20,81
a. Konsumsi Kolektif	5,71	a. Barang	17,51
b. Konsumsi Individu	3,60	a.1. Barang Non-migas	14,44
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	32,19	a.2. Barang migas	3,07
a. Bangunan	24,05	b. Jasa	3,30
b. Mesin dan Perlengkapan	3,30	Diskrepansi Statistik	-0,58
c. Kendaraan	1,67		

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Mengetahui ancaman resesi global yang ada di depan mata, Pemerintah sudah semestinya diharapkan untuk dapat merumuskan kebijakan yang dapat melindungi ekonomi Indonesia masuk dalam jurang resesi termasuk melindungi masyarakat dari dampak buruk resesi global. Kebijakan perlindungan ekonomi Indonesia dari resesi global ini harus akurat menyasar sektor-sektor yang memang memiliki daya ungkit dalam perekonomian Indonesia berdasarkan data PDB Indonesia.

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA?

Dalam usaha untuk melindungi perekonomian Indonesia dan masyarakat dari ancaman resesi global tahun 2023, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan:

1. Pemberian Bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, hal ini terbukti dalam siaran pers Oktober 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) menyatakan bahwa 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia merupakan UMKM,

96,9% tenaga kerja di Indonesia terserap di UMKM, serta hal yang sangat penting adalah UMKM berkontribusi sangat besar terhadap PDB yaitu mencapai 60,5%. Merujuk pada indikator-indikator resesi pada suatu negara yang telah dijelaskan di atas bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki peran yang sangat besar maka, besarnya peran UMKM dalam menanggulangi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ini perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,4 juta.

Dalam beberapa resesi yang dialami Indonesia yaitu resesi tahun 1998, tahun 2008, dan tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19, UMKM terbukti dapat menjadi peredam guncangan kondisi ekonomi yang sedang memburuk (Tambunan, 2021). Terkecuali saat resesi akibat Pandemi Covid-19 dimana terdapat beberapa UMKM yang terpaksa tutup akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Dengan begitu, dalam resesi global tahun 2023, UMKM dipercaya tidak akan terdampak bahkan menjadi garda terdepan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tentunya sudah cukup untuk membuat Pemerintah menyiapkan amunisi kebijakan khusus untuk UMKM dalam usaha melindungi ekonomi Indonesia dari ancaman resesi global tahun 2023. Pemerintah diharapkan dapat menggulirkan bantuan sosial (Bansos) untuk UMKM seperti yang telah dilakukan pada saat Pandemi Covid-19. Kemenko Perekonomian mengamini hal ini dengan mengatakan bahwa Bansos untuk UMKM ini akan membantu pembayaran cicilan kredit perbankan dan akan membantu UMKM dari sisi permodalan untuk mengembangkan usahanya serta melindungi UMKM dari kenaikan inflasi. Pemberian bantuan sosial produktif kepada UMKM ini tentunya perlu disertai dengan program pendataan UMKM agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.

Selain bantuan yang sifatnya Bansos, Pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa pembiayaan yang murah kepada UMKM. Saat ini Pemerintah memiliki Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro dimana usaha mikro dapat diperikan pinjaman jika belum sama sekali memperoleh pinjaman. Pemerintah juga memiliki Program Stimulus Ekonomi kepada UMKM yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah dengan syarat terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki utang lancar. Diharapkan Pemerintah dapat memberikan kelonggaran akses kredit kepada UMKM melalui dua program tersebut.

2. Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Pengangguran

Saat ini 9,54% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan yang berarti Indonesia memiliki penduduk miskin sejumlah 26,16 juta jiwa. Jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta jiwa, dimana jumlah tersebut naik dari Februari 2022 yaitu sebanyak 8,40 juta jiwa, bahkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mulai terlihat di Indonesia seperti yang terjadi di sektor industri tekstil dan alas kaki. Hal ini tentunya akan mengakibatkan daya beli masyarakat semakin turun yang akan mengurangi konsumsi rumah tangga Indonesia. Mengingat konsumsi rumah tangga merupakan penopang perekonomian Indonesia, maka Pemerintah perlu untuk segera mengambil tindakan.

Pemerintah telah memiliki beberapa program Bansos untuk masyarakat miskin, bahkan Pemerintah menambah program Bansos yaitu bantuan langsung tunai minyak goreng dan bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji dibawah Rp 5 Juta. Untuk menghadapi resesi global 2023, Pemerintah diharapkan untuk mempersiapkan program bantuan sosial yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain mempersiapkan Bansos, Pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan data penerima Bansos. Salah satu basis data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana masih ditemukan banyak permasalahan yang dapat mengakibatkan akurasi DTKS dipertanyakan, permasalahan tersebut antara lain beberapa daerah tidak memutakhirkan data, kekurangan SDM untuk verifikasi dan validasi data, dan DTKS belum terintegrasi dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri (Helmizar dkk, 2021). Pemerintah secara pararel perlu untuk melakukan perbaikan basis data Bansos dan

mempersiapkan program Bansos untuk menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi dan juga mencegah Indonesia masuk dalam jurang resesi pada tahun 2023.

3. Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor

Berdasarkan data PDB yang telah dijelaskan, Ekspor memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah data negara tujuan ekspor Indonesia beserta proporsinya selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2021:

Tabel 2. Negara Tujuan Ekspor Indonesia

Tujuan Ekspor Indonesia	Percentase
ASEAN	21,05%
Asia Lainnya	72,92%
AFRIKA	1,00%
AUSTRALIA & OCEANIA	0,97%
NAFTA	1,20%
Amerika Lainnya	0,25%
Uni Eropa	2,27%
Eropa Lainnya	0,33%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022. Diolah

Data menunjukkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada pasar Asia yaitu sebesar 93,97% selama 5 tahun terakhir. Negara tujuan ekspor terbesar adalah Tiongkok sebesar 33,13%. Jika pasar Asia terguncang oleh resesi global, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terancam ikut terguncang karena neraca perdagangan akan menunjukkan angka minus, beberapa komoditas terancam tidak terbeli. Ketergantungan ekspor Indonesia terhadap Tiongkok ini juga mengkhawatirkan, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam acara *Press Conference – 4th Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting* menyatakan bahwa Tiongkok mengalami perlambatan ekonomi dan dikhawatirkan akan mengalami resesi ekonomi di tahun 2023. Hal ini tentunya akan membahayakan ekspor Indonesia yang pada akhirnya akan memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu untuk mulai mencari pasar lain sebagai usaha diversifikasi agar ketika suatu negara jatuh pada jurang resesi, neraca perdagangan Indonesia tidak terlalu terpengaruh.

4. Menunda Program Ibukota Negara (IKN)

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN sampai dengan tahun 2045 menapai Rp466 triliun dengan kondisi APBN akan menanggung Rp89,4 triliun atau sebesar 20% dari total kebutuhan anggaran tersebut. Sisanya akan ditanggung melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha serta terdapat juga kontribusi swasta didalamnya.

Dalam APBN tahun 2023, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp23,6 triliun. Beberapa ekonom berpendapat ditengah ancaman resesi global tahun 2023, seharusnya pembangunan IKN ditunda dan lebih fokus pada ancaman resesi global tahun 2023. Berkaca dari resesi tahun 2020, untuk menghadapinya, belanja Bansos mengalami peningkatan signifikan. Seharusnya pengalaman ini dapat diterapkan dalam APBN tahun 2023, dimana anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara digunakan untuk Bansos yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dibutuhkan oleh negara untuk mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi.

REKOMENDASI

Dalam usaha melindungi perekonomian Indonesia dan masyarakat dari ancaman resesi global tahun 2023, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diharapkan dapat berperan aktif. Peran DPR RI dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Mendorong Kemenkop UKM untuk melakukan perbaikan basis data UMKM di Indonesia.

2. Meminta Kemenkop UKM untuk melonggarkan persyaratan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro dan Program Stimulus Ekonomi kepada UMKM.
3. Mendorong Kemenkop UKM dan Kementerian Keuangan untuk memformulasikan bantuan sosial untuk UMKM pada tahun 2023.
4. Mendorong Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi ketergantungan ekspor Indonesia terhadap negara tertentu dan menyusun analisa potensi perluasan negara tujuan ekspor Indonesia.
5. Mendorong Kementerian Sosial untuk memperbaiki DTKS dan melakukan integrasi dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri.
6. Mendorong Kementerian Keuangan untuk memformulasikan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan pengangguran untuk menjaga daya beli masyarakat.
7. Mendorong Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan kelonggaran realokasi anggaran pembangunan IKN untuk program terkait perlindungan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi global tahun 2023.

REFERENSI

- Aristanti, Nimas Des. 2022. "Resesi Ekonomi: Apa Itu Resesi Ekonomi dan Apa Saja Indikatornya?". *Artikel*. Diakses dari <https://koinworks.com/blog/indikator-resesi-ekonomi/#:~:text=Apabila%20pendapatan%20nasional%20suatu%20negara,Luar%20Negeri%20untuk%20Modal%20Bisnis> pada 28 November 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Distribusi PDB Triwulan atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik 2022. *Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Nilai Ekspor menurut Negara Asal Utama*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *PDB Triwulan atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Persentase Penduduk Miskin*. Jakarta.
- Guenette, Justin Damien., Kose M Ayhan., dan Naotaka Sugawara. 2022. *Is a Global Recession Imminent?*. World Bank Group Equitable Growth, Finance & Institutions Policy Note.
- Helmizar dkk. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.
- International Monetary Fund. 2022. *World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis*. Washington DC.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah". *Siaran Pers*. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2020. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun. 2018 – 2019*. Jakarta.
- Statista. 2022. "Monthly 12-month inflation rate in the United States from January 2020 to October 2022". *Data*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/273418/unadjusted-monthly-inflation-rate-in-the-us/#:~:text=In%20October%202022%2C%20prices%20had,data%20represents%20U.S.%20city%20averages%20pada%2029%20November%202022> pada 29 November 2022.
- Statista. 2022. "Harmonized index of consumer prices (HICP) inflation rate of the European Union from January 2002 to October 2022, by category". *Data*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/328540/monthly-inflation-rate-eu/> pada 29 November 2022.

Tambunan, Tulus. 2021. "Micro, small and medium enterprises in times of crisis: Evidence from Indonesia". *Journal of the International Council for Small Business*, 2:4, 278-302, DOI: 10.1080/26437015.2021.1934754